



## Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Media Online untuk Advokasi Masyarakat Muslim di Jepara

Wahyu Khoiruz Zaman<sup>1</sup>, Agus Supriyanto<sup>2</sup>,  
Muhamad Hasan Asyadily<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Kudus <sup>1,2,3</sup>

e-mail: wahyukz@uinsuku.ac.id

### Abstract

*This community service program aimed to strengthen the capacity of Muslim community organizations and NGOs in Jepara Regency to use online media for public advocacy. The program was conducted from 10 April to 10 May 2026 at Rumah Makan Maribu and the Pendapa of Jepara Regency, Central Java. The method combined participatory training and mentoring through issue mapping, source verification, angle formulation, article writing, online publication simulation, and social media distribution planning. The results indicate that participants became more aware of the workflow of digital advocacy, from identifying community issues to transforming them into credible public narratives. Participants were also able to formulate advocacy angles, draft media content, and design simple distribution plans through social media. The program shows that online advocacy training is more effective when it is not limited to technical writing skills but also includes verification ethics, framing sensitivity, editorial discipline, and follow-up mentoring. Sustainable assistance is needed to ensure that Muslim civil society organizations can transform local issues into responsible, persuasive, and publicly useful digital messages.*

**Keywords:** Online Media, Digital Advocacy, Community Organizations.

### Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat kapasitas organisasi masyarakat Muslim dan NGO di Kabupaten Jepara dalam memanfaatkan media online untuk advokasi publik. Kegiatan dilaksanakan pada 10 April hingga 10 Mei 2026 di Rumah Makan Maribu dan Pendapa Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Metode kegiatan memadukan pelatihan partisipatif dan pendampingan melalui pemetaan isu, verifikasi sumber, perumusan angle tulisan, penyusunan artikel, simulasi publikasi media online, serta perencanaan distribusi pesan melalui media sosial. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai alur advokasi digital, mulai dari menemukan isu masyarakat hingga mengolahnya menjadi narasi publik yang kredibel. Peserta juga mampu merumuskan angle advokasi, menyusun draf tulisan media, dan merancang strategi distribusi sederhana melalui media sosial. Kegiatan ini menegaskan bahwa pelatihan advokasi media online tidak cukup berfokus pada keterampilan teknis menulis, tetapi juga perlu menekankan etika verifikasi, kepekaan framing, disiplin editorial, dan pendampingan lanjutan. Pendampingan berkelanjutan diperlukan agar organisasi masyarakat Muslim dapat mengubah isu lokal menjadi pesan digital yang bertanggung jawab, persuasif, dan bermanfaat bagi publik.

**Kata Kunci:** Media Online, Advokasi Digital, Organisasi Masyarakat.

## **PENDAHULUAN**

Transformasi digital telah mengubah cara organisasi masyarakat sipil menyampaikan aspirasi, membangun dukungan, dan mengawal isu publik. Advokasi yang sebelumnya banyak bertumpu pada tatap muka, forum warga, surat resmi, atau jaringan elite lokal kini semakin dipengaruhi oleh keberadaan media online dan media sosial. Media online tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai ruang produksi makna, ruang konsolidasi komunitas, dan ruang mobilisasi perhatian publik. Kajian (Lovejoy & Saxton, 2012) menunjukkan bahwa organisasi nirlaba memanfaatkan media sosial untuk tiga fungsi utama, yaitu informasi, komunitas, dan aksi. Temuan ini relevan dengan kebutuhan organisasi masyarakat Muslim dan NGO di daerah yang membutuhkan kanal komunikasi efektif untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Perubahan ekosistem komunikasi publik juga melahirkan pola advokasi yang lebih terhubung, cepat, dan berbasis jejaring. Penelitian (Bennett & Segerberg, 2012) menyebut fenomena tersebut sebagai connective action, yaitu pola tindakan kolektif yang bergerak melalui personalisasi pesan dan distribusi digital. Isu publik dapat memperoleh dukungan luas ketika narasi advokasi disusun dengan jelas, mudah dibagikan, dan memiliki kedekatan dengan pengalaman warga. Media digital dengan demikian membuka peluang bagi organisasi lokal untuk memperluas jangkauan advokasi tanpa sepenuhnya bergantung pada struktur komunikasi konvensional. Peluang digital tersebut tidak otomatis menghasilkan perubahan sosial yang berkelanjutan. Pendapat (Lim, 2013), melalui kajian tentang aktivisme media sosial di Indonesia, mengingatkan bahwa partisipasi digital sering kali mudah viral tetapi sulit bertahan apabila tidak disertai pengorganisasian isu, jejaring, dan tindak lanjut yang nyata. Keberhasilan advokasi digital tidak hanya ditentukan oleh seberapa ramai sebuah isu diperbincangkan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam menghubungkan percakapan online dengan kerja advokasi yang terencana di tingkat komunitas.

Ruang digital juga menjadi bagian penting dari praktik keislaman dan gerakan sosial Muslim. Menurut (Nisa, 2018) menunjukkan bahwa media sosial dapat melahirkan gerakan sosial Islam yang semi-virtual melalui jejaring dakwah dan komunitas. Pendapat (Slama, 2018) juga menegaskan bahwa praktik Islam di Indonesia semakin banyak diekspresikan, dinegosiasikan, dan disebarakan melalui media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi masyarakat Muslim memiliki peluang besar untuk memanfaatkan media online bukan hanya sebagai medium dakwah, tetapi juga sebagai alat advokasi kemasyarakatan yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Advokasi melalui media online membutuhkan literasi media yang memadai. Menurut (Livingstone, 2004) menekankan bahwa literasi media mencakup kemampuan mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan pesan media.

Literasi media tidak cukup dipahami sebagai kemampuan menggunakan perangkat digital, tetapi juga mencakup kemampuan memilih isu yang layak, memverifikasi data, menilai kepentingan publik, menentukan angle tulisan, serta mengemas pesan agar tidak menimbulkan salah paham. Penelitian (Ashley, Maksl & Craft, 2017) juga menemukan hubungan antara literasi berita dan keterlibatan publik, sehingga penguatan literasi media dapat menjadi basis penting bagi peningkatan kapasitas advokasi warga.

Kebutuhan literasi tersebut semakin penting karena ruang digital juga rentan terhadap hoaks, disinformasi, konflik wacana, dan polarisasi. Penelitian (Vosoughi, Roy & Aral, 2018) menunjukkan bahwa berita palsu dapat menyebar lebih luas, lebih cepat, dan lebih dalam dibandingkan berita benar pada ekosistem media sosial. Sedangkan (Vraga & Tully, 2021) menegaskan bahwa literasi berita berperan dalam membentuk sikap skeptis terhadap informasi di media sosial. Advokasi masyarakat melalui media online harus didampingi oleh kemampuan verifikasi, etika komunikasi publik, dan kesadaran bahwa pesan advokasi tidak boleh berubah menjadi provokasi.

Organisasi masyarakat dan NGO di Kabupaten Jepara memiliki peran strategis dalam mengawal berbagai isu sosial, keagamaan, pendidikan, lingkungan, ekonomi, dan pelayanan publik. Sebagai wilayah dengan basis masyarakat Muslim yang kuat, Jepara memiliki banyak jejaring sosial-keagamaan yang dapat menjadi modal advokasi. Akan tetapi, tidak semua organisasi memiliki kemampuan teknis untuk mengolah isu menjadi tulisan yang layak terbit di media online. Sebagian peserta kegiatan memiliki pengalaman advokasi lapangan, tetapi belum terbiasa menyusun narasi media, menentukan sudut pandang, membuat lead, menata data, atau mendistribusikan pesan melalui platform digital secara sistematis.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertajuk Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Media Online untuk Advokasi Masyarakat Muslim di Jepara dilaksanakan untuk memperkuat kapasitas organisasi masyarakat dan NGO. Kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai pelatihan menulis, tetapi sebagai pendampingan alur advokasi digital yang mencakup pencarian isu, pemilihan isu, penggalian data, penentuan angle, penyusunan tulisan, publikasi di media online, serta distribusi pesan melalui media sosial. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan peserta dalam mengubah isu masyarakat menjadi pesan advokasi yang informatif, etis, kredibel, dan berdampak bagi publik.

#### **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan pelatihan partisipatif dan pendampingan berbasis kebutuhan peserta. Pendekatan ini dipilih karena sasaran kegiatan bukan sekadar menerima

materi, melainkan terlibat aktif dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan isu, menyusun pesan, dan mengevaluasi hasil latihan. Prinsip tersebut sejalan dengan *community-based participatory research* yang menempatkan masyarakat sebagai mitra dalam proses identifikasi masalah dan tindakan perubahan (Israel et al., 1998; Wallerstein and Duran, 2010). Pendekatan partisipatif juga menekankan keterkaitan antara refleksi, pengumpulan data, dan tindakan nyata, sebagaimana dijelaskan dalam kajian *participatory action research* (Baum, MacDougall and Smith, 2006).

Pelaksanaan kegiatan berlangsung pada 10 April hingga 10 Mei 2026 di dua lokasi, yaitu Rumah Makan Maribu dan Pendapa Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Peserta kegiatan merupakan perwakilan organisasi masyarakat atau NGO di Kabupaten Jepara. Pemilihan sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan peran peserta dalam kerja advokasi masyarakat, keterlibatan mereka dalam isu sosial-keagamaan, serta kebutuhan peningkatan kapasitas komunikasi publik. Dalam kegiatan ini, peserta diposisikan sebagai aktor yang memiliki pengalaman lapangan, sedangkan tim pengabdian berperan sebagai fasilitator, pelatih, dan pendamping editorial.

Tahapan kegiatan meliputi identifikasi kebutuhan, pelatihan inti, praktik penyusunan tulisan, pendampingan publikasi, serta evaluasi. Identifikasi kebutuhan dilakukan melalui diskusi awal mengenai pengalaman peserta dalam menggunakan media online, hambatan menulis, dan isu-isu masyarakat yang sering mereka temui. Pelatihan inti berisi materi pemanfaatan media online untuk advokasi, mulai dari mencari isu, mendapatkan data, menentukan angle, menyusun tulisan, melakukan penyuntingan dasar, memahami standar media online, hingga menggunakan media sosial untuk mendistribusikan pesan. Menurut (Vaughn & Jacquez, 2020) menjelaskan bahwa metode partisipatif perlu memilih tingkat keterlibatan peserta secara sadar pada setiap tahap, mulai dari konsultasi, kolaborasi, hingga pemberdayaan; prinsip ini digunakan dalam proses pendampingan kegiatan.

Evaluasi kegiatan dilakukan secara deskriptif melalui observasi keterlibatan peserta, catatan diskusi, telaah draf tulisan, umpan balik peserta, serta refleksi akhir. Indikator keberhasilan kegiatan meliputi kemampuan peserta mengidentifikasi isu yang layak diadvokasi, kemampuan merumuskan angle tulisan, kemampuan menyusun kerangka tulisan, kemampuan membedakan pesan informatif dan provokatif, serta kemampuan menyusun rencana distribusi pesan melalui media sosial. Data kegiatan dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk menggambarkan proses, capaian, kendala, dan rekomendasi pengembangan program.

**Tabel 1**  
**Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

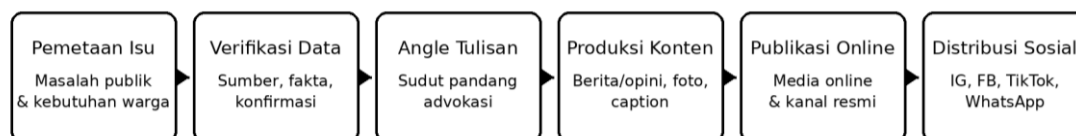
<b>Tahap</b>	<b>Waktu/Lokasi</b>	<b>Aktivitas</b>	<b>Luaran</b>
Identifikasi kebutuhan	10 April 2026, Rumah Makan Maribu	Diskusi awal tentang pengalaman advokasi, hambatan penulisan, dan kebutuhan pemanfaatan media online.	Peta kebutuhan peserta dan daftar isu awal.
Pelatihan inti	April 2026, Rumah Makan Maribu	Materi pencarian isu, verifikasi data, angle tulisan, struktur tulisan media online, dan etika advokasi digital.	Pemahaman alur advokasi media online.
Praktik dan pendampingan	April-Mei 2026, pendampingan langsung dan daring	Peserta menyusun kerangka tulisan, lead, argumentasi, data pendukung, dan rencana publikasi.	Draf tulisan advokasi dan rencana editorial sederhana.
Evaluasi dan refleksi	10 Mei 2026, Pendapa Kabupaten Jepara	Review draf, refleksi kendala, diskusi strategi distribusi pesan melalui media sosial.	Rekomendasi tindak lanjut dan model pendampingan berkelanjutan.

Sumber: Data diolah, 2026

## **PEMBAHASAN**

Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan media online untuk advokasi masyarakat Muslim di Jepara menunjukkan bahwa organisasi masyarakat dan NGO memiliki modal sosial yang kuat, tetapi memerlukan penguatan kapasitas dalam mengubah pengalaman lapangan menjadi narasi media. Peserta pada umumnya telah memahami problem masyarakat di sekitarnya, namun belum seluruhnya terbiasa membedakan antara keluhan, isu, data, angle, dan pesan advokasi. Dalam ekosistem digital, perbedaan tersebut penting karena pesan yang tidak dirancang dengan baik dapat tenggelam di tengah banjir informasi atau justru menimbulkan kontroversi yang tidak produktif. Hal ini berkaitan dengan konsep networked gatekeeping dan networked framing, yaitu proses ketika visibilitas isu dan cara publik memahami isu dipengaruhi oleh jaringan, aktor, dan mekanisme platform digital (Meraz and Papacharissi, 2013).

**Gambar 1**  
**Alur Advokasi Media Online**



Sumber: Data diolah, 2026

Tahap pertama kegiatan menekankan pemetaan isu. Peserta diajak membedakan antara peristiwa, masalah, isu, dan agenda advokasi. Peristiwa adalah kejadian faktual yang dapat diamati, sedangkan isu adalah masalah yang memiliki relevansi publik dan membutuhkan perhatian lebih luas. Isu perlu dirumuskan secara jelas agar dapat dikomunikasikan melalui narasi yang singkat, kuat, dan mudah dipahami. Menurut (Bennett & Segerberg (2012) menjelaskan bahwa media digital memungkinkan pesan yang dipersonalisasi bergerak lintas jaringan. Namun, pesan hanya dapat bergerak efektif apabila memiliki kejelasan masalah, kedekatan emosional, dan relevansi dengan pengalaman publik.

Pada sesi pemetaan isu, peserta menyadari bahwa tidak semua persoalan layak langsung dipublikasikan. Isu perlu diuji melalui beberapa pertanyaan: siapa warga yang terdampak, apa data pendukungnya, pihak mana yang relevan dimintai keterangan, apa kepentingan publiknya, serta perubahan apa yang ingin didorong. Proses ini penting untuk menghindari advokasi yang reaktif. Penelitian (Lim, 2013) mengingatkan bahwa aktivisme digital di Indonesia dapat cepat memperoleh klik, tetapi kurang berdampak apabila tidak dihubungkan dengan kerja sosial yang terorganisir. Karena itu, pelatihan ini menempatkan pemetaan isu sebagai tahap awal sebelum peserta menulis atau menyebarkan pesan.

Tahap kedua berfokus pada verifikasi data dan etika informasi. Peserta dilatih untuk tidak langsung menulis berdasarkan kabar dari satu pihak, tetapi memeriksa sumber, membedakan fakta dan opini, serta mencari konfirmasi dari pihak terkait. Dalam kerja advokasi, data tidak hanya berfungsi memperkuat tulisan, tetapi juga melindungi organisasi dari risiko penyebaran informasi keliru. Temuan (Vosoughi, Roy & Aral, 2018) mengenai cepatnya penyebaran berita palsu memperlihatkan bahwa verifikasi menjadi kompetensi utama dalam komunikasi digital. Hal ini juga sejalan dengan pandangan (Vraga & Tully, 2021) bahwa literasi berita mendorong pengguna media sosial lebih skeptis dan berhati-hati terhadap informasi.

Tahap ketiga adalah perumusan angle tulisan. Banyak peserta pada awalnya memahami angle sekadar sebagai judul, padahal angle merupakan sudut pandang utama yang menentukan fokus tulisan. Peserta dilatih mengubah isu

luas menjadi fokus yang lebih tajam. Misalnya, isu pelayanan publik dapat diarahkan pada dampaknya bagi warga miskin, akses kelompok rentan, transparansi kebijakan, atau kebutuhan perbaikan sistem. Dalam kajian media dan gerakan sosial, framing berperan penting karena menentukan bagaimana publik memahami masalah, siapa yang dianggap bertanggung jawab, dan tindakan apa yang dianggap perlu (Meraz and Papacharissi, 2013; Milan, 2015).

Perumusan angle juga berkaitan dengan kemampuan memilih bahasa advokasi. Advokasi masyarakat Muslim perlu menjaga keseimbangan antara keberanian menyuarakan masalah dan etika komunikasi publik. Pesan yang terlalu emosional dapat menarik perhatian, tetapi berisiko memicu resistensi atau salah tafsir. Sebaliknya, pesan yang terlalu datar dapat kehilangan daya dorong. Menurut (Harlow, 2012) menunjukkan bahwa media sosial dapat membantu gerakan online bergerak ke aksi offline ketika pesan mampu menggabungkan informasi, motivasi, dan ajakan yang jelas. Oleh sebab itu, peserta diarahkan menyusun tulisan yang berbasis fakta, berorientasi solusi, dan tetap persuasif.

Tahap keempat adalah praktik penyusunan tulisan media online. Peserta dikenalkan pada struktur sederhana tulisan advokasi, yaitu judul, lead, konteks masalah, data atau keterangan sumber, dampak bagi masyarakat, tuntutan atau rekomendasi, dan penutup. Pada bagian ini, peserta dilatih menghindari kalimat yang terlalu panjang, klaim tanpa bukti, dan penggunaan istilah yang tidak dipahami pembaca umum. Media online memiliki logika keterbacaan yang berbeda dari laporan organisasi. Tulisan advokasi perlu ringkas, jelas, dan memiliki alur argumentasi yang mudah diikuti. Menurut (Ashley, Maksl & Craft, 2017) menegaskan bahwa literasi berita berhubungan dengan pemahaman warga terhadap proses produksi berita dan keterlibatan publik, sehingga praktik menulis media dapat menjadi instrumen pendidikan kewargaan.

Tahap kelima adalah simulasi publikasi dan penyuntingan. Peserta diajak memahami bahwa tulisan yang baik tidak selesai pada draf pertama. Penyuntingan diperlukan untuk memastikan akurasi, kejelasan struktur, kelayakan bahasa, dan keamanan hukum. Proses editing juga menjadi mekanisme kontrol agar organisasi tidak memublikasikan informasi yang berpotensi menyerang personal, menyebarkan fitnah, atau mengabaikan hak jawab pihak terkait. Menurut (Livingstone, 2004) menempatkan kemampuan menciptakan dan mengevaluasi pesan sebagai bagian penting dari literasi media. Karena itu, penyuntingan dipahami sebagai bagian dari etika advokasi, bukan semata-mata perbaikan teknis bahasa.

Tahap keenam adalah distribusi pesan melalui media sosial. Materi ini penting karena tulisan yang telah dipublikasikan di media online belum tentu

menjangkau publik apabila tidak didistribusikan dengan strategi yang tepat. Peserta dilatih membuat caption, memilih kanal distribusi, menentukan waktu unggah, menyesuaikan pesan untuk Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp, serta menyusun ajakan yang tidak memaksa. Penelitian (Lovejoy & Saxton, 2012) menunjukkan bahwa fungsi media sosial organisasi nirlaba meliputi penyampaian informasi, pembangunan komunitas, dan dorongan aksi. Dengan kerangka tersebut, distribusi pesan tidak sekadar membagikan tautan, tetapi membangun percakapan dan mendorong keterlibatan publik.

Strategi distribusi juga memperhatikan pentingnya jaringan dan interaksi. Pendapat (Guo & Saxton, 2018) menemukan bahwa perhatian publik terhadap organisasi advokasi dipengaruhi oleh ukuran jaringan, frekuensi komunikasi, dan kemampuan organisasi terlibat dalam percakapan. Saxton dan Waters (2014) juga menunjukkan bahwa publik memberi respons berbeda terhadap konten informatif, promosi, dan pembangunan komunitas. Bagi organisasi masyarakat di Jepara, temuan ini berarti bahwa pengelolaan media sosial perlu dilakukan secara konsisten, bukan hanya ketika ada isu mendesak. Konsistensi akan membangun kredibilitas akun dan memperkuat kemungkinan pesan advokasi diterima oleh publik.

Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa media sosial memiliki potensi memperkuat partisipasi warga. Penelitian (Boulianne, 2015) menemukan adanya hubungan positif antara penggunaan media sosial dan partisipasi politik atau kewargaan. Dalam meta-analisis berikutnya yaitu (Boulianne, 2020) kembali menunjukkan bahwa media digital berpengaruh terhadap partisipasi sipil dan politik meskipun efeknya bervariasi. Dalam konteks pengabdian ini, potensi tersebut tampak pada antusiasme peserta untuk menjadikan media online sebagai sarana memperluas isu lokal. Namun, potensi itu tetap membutuhkan strategi, disiplin, dan pendampingan agar tidak berhenti pada unggahan sesaat.

Keterlibatan peserta dalam sesi diskusi menunjukkan bahwa organisasi masyarakat Muslim memiliki kekuatan pengalaman lapangan. Mereka memahami masalah warga, jaringan tokoh, dan konteks sosial lokal. Tantangannya adalah mengubah pengalaman tersebut menjadi narasi publik yang memenuhi standar media. Di sinilah pendampingan memiliki peran penting. Penelitian (Wallerstein & Duran, 2010) menekankan bahwa pendekatan partisipatif dapat menjembatani ilmu dan praktik karena masyarakat dilibatkan dalam proses tindakan. Dalam kegiatan ini, peserta tidak hanya mendengarkan materi, tetapi juga mempraktikkan penyusunan isu, mendiskusikan angle, dan menerima umpan balik terhadap draf tulisan.

Kegiatan ini menempatkan advokasi media online sebagai bagian dari tanggung jawab sosial masyarakat Muslim. Pesan advokasi diarahkan untuk

membela kepentingan publik, memperkuat kepedulian sosial, dan menjaga etika komunikasi. Hal ini relevan dengan kajian (Nisa, 2018) dan (Slama, 2018) yang menunjukkan bahwa media digital telah menjadi ruang penting bagi ekspresi dan gerakan Muslim di Indonesia. Bedanya, kegiatan ini tidak hanya memanfaatkan media digital untuk ekspresi keagamaan, tetapi juga untuk mengolah isu sosial menjadi narasi advokasi yang bertanggung jawab.

Kendala utama yang muncul selama pendampingan adalah perbedaan kemampuan menulis antarpeserta. Sebagian peserta mampu menemukan isu dengan cepat, tetapi kesulitan menyusun struktur tulisan. Sebagian lainnya memiliki keberanian menyampaikan kritik, tetapi perlu diarahkan agar kritik berbasis data dan tidak bersifat personal. Ada pula peserta yang telah aktif menggunakan media sosial, namun belum memahami perbedaan antara unggahan personal, rilis organisasi, dan tulisan media online. Menurut (Chon & Park, 2020) menjelaskan bahwa aktivisme media sosial dipengaruhi oleh persepsi masalah, emosi, dan efikasi media sosial. Temuan ini membantu menjelaskan mengapa peserta memerlukan penguatan tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada aspek kesadaran strategis.

Hasil kegiatan dapat diringkas dalam tiga capaian. Pertama, peserta memperoleh pemahaman mengenai alur advokasi media online, mulai dari isu hingga distribusi pesan. Kedua, peserta memiliki keterampilan awal menyusun angle dan kerangka tulisan. Ketiga, peserta menyadari pentingnya verifikasi data, etika bahasa, dan strategi distribusi. Meskipun belum semua peserta menghasilkan tulisan yang siap terbit secara penuh, kegiatan ini berhasil membangun fondasi kemampuan advokasi digital. Hal ini sejalan dengan (Baum, MacDougall & Smith, 2006) yang menekankan bahwa pendekatan partisipatif menghubungkan refleksi, data, dan tindakan.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa pelatihan media online untuk advokasi masyarakat Muslim perlu dilaksanakan secara berkelanjutan. Pelatihan satu kali mampu meningkatkan pemahaman, tetapi keberlanjutan diperlukan untuk membentuk kebiasaan menulis, keberanian publikasi, disiplin verifikasi, dan konsistensi distribusi. Model pendampingan berikutnya dapat dikembangkan dalam bentuk klinik tulisan, forum editorial bulanan, grup diskusi isu, bank data lokal, serta kolaborasi dengan media online lokal. Organisasi masyarakat dan NGO di Jepara tidak hanya menjadi objek pemberitaan, tetapi juga mampu menjadi produsen narasi publik yang kredibel dan bermanfaat.

**Tabel 2**  
**Capaian dan Rekomendasi Tindak Lanjut**

<b>Aspek Pendampingan</b>	<b>Capaian Utama</b>	<b>Rekomendasi Lanjutan</b>
Pemetaan isu	Peserta mampu membedakan keluhan, peristiwa, isu, dan agenda advokasi.	Membuat bank isu lokal berbasis data dan prioritas dampak publik.

Angle dan penulisan	Peserta mulai mampu menyusun fokus tulisan dan kerangka narasi advokasi.	Menyelenggarakan klinik penulisan rutin untuk menghasilkan tulisan siap publikasi.
Verifikasi dan etika	Peserta memahami pentingnya sumber, konfirmasi, dan bahasa yang tidak provokatif.	Menyusun panduan editorial sederhana bagi organisasi/NGO.
Distribusi media sosial	Peserta memahami strategi caption, kanal distribusi, dan ajakan aksi digital.	Membentuk tim kecil pengelola kanal digital pada setiap organisasi.

Sumber: Data diolah, 2026

## KESIMPULAN

Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Media Online untuk Advokasi Masyarakat Muslim di Jepara memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan NGO dalam mengelola isu publik melalui media online. Kegiatan yang dilaksanakan pada 10 April hingga 10 Mei 2026 di Rumah Makan Maribu dan Pendapa Kabupaten Jepara ini menunjukkan bahwa peserta memiliki modal pengalaman lapangan dan jejaring sosial yang kuat, tetapi membutuhkan penguatan dalam aspek penulisan, verifikasi, framing, publikasi, dan distribusi pesan digital. Melalui pelatihan partisipatif dan pendampingan, peserta memperoleh pemahaman mengenai alur advokasi digital, mulai dari pencarian isu, penggalian data, penentuan angle, penyusunan tulisan, publikasi media online, hingga pemanfaatan media sosial untuk memperluas pesan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa advokasi media online tidak cukup dipahami sebagai kemampuan teknis mengunggah konten, tetapi sebagai proses komunikasi publik yang membutuhkan akurasi, etika, strategi, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, program serupa perlu dilanjutkan melalui klinik penulisan, forum editorial, pendampingan publikasi, serta pembentukan tim media pada organisasi masyarakat dan NGO. Dengan pendampingan berkelanjutan harapannya organisasi masyarakat Muslim di Jepara berpotensi menjadi aktor advokasi digital yang mampu menyuarakan isu lokal secara kredibel, persuasif, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ashley, S., Maksl, A. and Craft, S., 2017. News media literacy and political engagement: What's the connection? *Journal of Media Literacy Education*, 9(1), pp.79-98. <https://doi.org/10.23860/JMLE-2017-9-1-6>
- Baum, F., MacDougall, C. and Smith, D., 2006. Participatory action research. *Journal of Epidemiology & Community Health*, 60(10), pp.854-857. <https://doi.org/10.1136/jech.2004.028662>
- Bennett, W.L. and Segerberg, A., 2012. The logic of connective action: Digital

- media and the personalization of contentious politics. *Information, Communication & Society*, 15(5), pp.739-768. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.670661>
- Boulianne, S., 2015. Social media use and participation: A meta-analysis of current research. *Information, Communication & Society*, 18(5), pp.524-538. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1008542>
- Boulianne, S., 2020. Twenty years of digital media effects on civic and political participation. *Communication Research*, 47(7), pp.947-966. <https://doi.org/10.1177/0093650218808186>
- Chon, M.-G. and Park, H., 2020. Social media activism in the digital age: Testing an integrative model of activism on contentious issues. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 97(1), pp.72-97. <https://doi.org/10.1177/1077699019835896>
- Guo, C. and Saxton, G.D., 2018. Speaking and being heard: How nonprofit advocacy organizations gain attention on social media. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 47(1), pp.5-26. <https://doi.org/10.1177/0899764017713724>
- Halpern, D. and Gibbs, J., 2013. Social media as a catalyst for online deliberation? Exploring the affordances of Facebook and YouTube for political expression. *Computers in Human Behavior*, 29(3), pp.1159-1168. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.10.008>
- Harlow, S., 2012. Social media and social movements: Facebook and an online Guatemalan justice movement that moved offline. *New Media & Society*, 14(2), pp.225-243. <https://doi.org/10.1177/1461444811410408>
- Israel, B.A., Schulz, A.J., Parker, E.A. and Becker, A.B., 1998. Review of community-based research: Assessing partnership approaches to improve public health. *Annual Review of Public Health*, 19, pp.173-202. <https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.19.1.173>
- Lim, M., 2013. Many clicks but little sticks: Social media activism in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 43(4), pp.636-657. <https://doi.org/10.1080/00472336.2013.769386>
- Livingstone, S., 2004. Media literacy and the challenge of new information and communication technologies. *The Communication Review*, 7(1), pp.3-14. <https://doi.org/10.1080/10714420490280152>
- Lovejoy, K. and Saxton, G.D., 2012. Information, community, and action: How nonprofit organizations use social media. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 17(3), pp.337-353. <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2012.01576.x>
- Meraz, S. and Papacharissi, Z., 2013. Networked gatekeeping and networked framing on #Egypt. *The International Journal of Press/Politics*, 18(2), pp.138-166. <https://doi.org/10.1177/1940161212474472>
- Milan, S., 2015. From social movements to cloud protesting: The evolution of collective identity. *Information, Communication & Society*, 18(8), pp.887-900. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1043135>

- Nisa, E.F., 2018. Social media and the birth of an Islamic social movement: ODOJ (One Day One Juz) in contemporary Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 46(134), pp.24-43. <https://doi.org/10.1080/13639811.2017.1416758>
- Saxton, G.D. and Waters, R.D., 2014. What do stakeholders like on Facebook? Examining public reactions to nonprofit organizations' informational, promotional, and community-building messages. *Journal of Public Relations Research*, 26(3), pp.280-299. <https://doi.org/10.1080/1062726X.2014.908721>
- Slama, M., 2018. Practising Islam through social media in Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 46(134), pp.1-4. <https://doi.org/10.1080/13639811.2018.1416798>
- Tufekci, Z. and Wilson, C., 2012. Social media and the decision to participate in political protest: Observations from Tahrir Square. *Journal of Communication*, 62(2), pp.363-379. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2012.01629.x>
- Valenzuela, S., 2013. Unpacking the use of social media for protest behavior: The roles of information, opinion expression, and activism. *American Behavioral Scientist*, 57(7), pp.920-942. <https://doi.org/10.1177/0002764213479375>
- Vaughn, L.M. and Jacquez, F., 2020. Participatory research methods - choice points in the research process. *Journal of Participatory Research Methods*, 1(1), pp.1-13. <https://doi.org/10.35844/001c.13244>
- Vosoughi, S., Roy, D. and Aral, S., 2018. The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), pp.1146-1151. <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>
- Vraga, E.K. and Tully, M., 2021. News literacy, social media behaviors, and skepticism toward information on social media. *Information, Communication & Society*, 24(2), pp.150-166. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1637445>
- Wallerstein, N. and Duran, B., 2010. Community-based participatory research contributions to intervention research: The intersection of science and practice to improve health equity. *American Journal of Public Health*, 100(S1), pp.S40-S46. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2009.184036>